



**Supervision of the Village Consultative Body (BPD)
in Infrastructure Development in Indari Village, West Bacan District
South Halmahera Regency**

**Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan
Infrastruktur Di Desa Indari Kecamatan Bacan Barat
Kabupaten Halmahera Selatan**

Supriyanto Busra¹. Ali Lating². Rahmat Suaib³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Email-supriyantobusra@gmail.com

²Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Email- alilating72@gmail.com

³Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Informasi Tentang Artikel

Diterima : Oktober 2023

Disetujui : November 2023

Diterbitkan : Desember 2023

Abstract

The implementation of Village Development will run well, which is largely determined by the level of supervision of the Supervisory institution, one of which is the Village Consultative Body (BPD). The main task is to ensure that every development implementation runs well from the planning to evaluation and accountability aspects. BPD supervision is also important so that development implementation is in accordance with the determined goals and benefits.

The method used in this research is a descriptive qualitative method. The data sources used are primary data such as the village head, BPD chairman, deputy chairman and members, as well as community leaders who are considered to have the ability to assess the program being implemented. Secondary data is in the form of planning and budgeting documents. which has been agreed upon by the village government and BPD. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. And the use of data analysis techniques in research is an analysis technique, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification

The results of the research show that BPD supervision in the implementation of infrastructure in Indari Village in 2023 is carried out directly, including the program for building concrete fences, building toilets and building clean water. This is intended to find out more deeply about the development of the program, both in terms of time, budget realization and targeted targets. must be fulfilled in accordance with the plan that has been agreed upon in development planning. The implementation of coordination in the development program is quite good between the village government and the BPD, especially related to the program implementation process until the program ends. A number of obstacles faced include: budget delays in the disbursement process due to technical obstacles.

Keywords: BPD, Supervision, Infrastructure, and Budget



PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya beraal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permasyarakatan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa. Sedangkan berdasarkan pengamatan awal dari informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Indari nampaknya masih belum efektif. Hal ini terlihat dari tugas Sebuah jembatan laut di Desa Indari kecamatan bacan barat, kabupaten halmahera selatan, Provinsi maluku utara dalam keadaan rusak, namun sampai saat ini tidak ada perbaikan oleh pemerinta desa maupun pemerinta kabupaten. kondisi jembatan di desa Indari kecamatan Bacan Barat, Halmahera Selatan. Hal ini ditakutkan warga nantinya akan memakan korban kecelakaan. Palsnya, kondisi jembatan rusak akibat tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat untuk diperbaiki.



Desa Indari terkesan belum berjalan maksimal karena masih ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat Desa indari, namun belum tersedia. Dalam hal ini yang perlu disoroti adalah peran dari Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga legislatif tingkat desa yang juga memiliki andil dalam pembangunan di desa. Namun yang terjadi beberapa anggota BPD yang tidak aktif dalam rapat maupun kegiatan yang di haruskan BPD untuk ikut serta, selain itu dalam fungsi pengawasan, BPD tidak terlalu berperan dalam pengawasan program desa, hanya sebatas apakah program sudah dilaksanakan atau belum, juga sebagian besar BPD periode ini sebagian besar tidak mengetahui permasalahan yang ada di desa, sehingga BPD hanya seperti sebagai pelengkap untuk melengkapi susunan yang ada. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu belum optimalnya dalam melaksanakan pengawasan pembangunan infrastruktur, kesibukan dari beberapa anggota BPD sehingga tidak dapat menampung aspirasi masyarakat dengan baik.

METODE

Dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi mengenai dengan suatu fonemena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeksripsikan sejumlah informasi yang berkenan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan Kualitatif. Dimana penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subyek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif seperti yang dikemukakan Silalahi (2012:38) yang menyebutkan bahwa penelitian kualitatif kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Berdasarkan definisi tersebut, penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran pengawasan oleh BPD dalam mengefektifkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

HASIL DAN DISKUSI

Pengawasan BPD Dalam Peleksanaan Infrastruktur Desa Indari



Tahapan Perencanaan.

Perencanaan pembangunan Desa tahapan awal yang dilakukan oleh pemerintah Desa yang didalam ikut terlibat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan semua sumber daya Desa dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Perencanaan dalam pembangunan Desa disusun oleh pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan asal-usul dan kewenangan berskala lokal pemerintah Desa dengan melibatkan unsur dari masyarakat Desa dan juga boleh didampingi perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa atau lainnya.

Adapun proses perencanaan pembangunan Desa terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa, 4 tahapan dalam proses pembangunan Desa , yaitu Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pertanggung jawaban harus sudah ditetapkan. Sedangkan untuk Rencana Kerja ditetapkan paling lambat akhir Juni tahun berjalan.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan Desa merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan melalui dua tahap yaitu persiapan dan pelaksanaan pembangunan. Tahapan persiapan yang meliputi penetapan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi atau publikasi kegiatan, pembekalan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan koordinasi, dan sinergitas pelaksanaan kegiatan, pengadaan bahan atau material.

Selanjutnya, untuk tahapan pelaksanaan pembangunan Desa kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi rapat kerja pelaksanaan kegiatan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, perubahan pelaksanaan kegiatan, penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah, pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan, pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan dan berkelanjutan hasil kegiatan.



Untuk pencairan. Dana Desa tidak langsung ditransfer ke rekening Desa tetapi mempunyai beberapa tahap dan harus melengkapi dokumen persyaratan pencairan Dana Desa. Pencairan Dana Desa mempunyai 2 tahapan dalam setahun di tahap pertama dicairkan 40 Persen, ditahap kedua 40 persen. Setiap pengajuan pencairan Dana Desa harus memenuhi dokumen persyaratan yang telah ditetapkan yaitu

Dokumen RKPDesa, dokumen APBDesa, Perdes, RKD, LPPD, SPJ, Proposal, Surat pernyataan tanggung jawab dan disetujui oleh camat, sekcab, Kasi PMD, Supervisor dan pendamping kecamatan untuk desa Indari. Berikut adalah jumlah Dana Desa di Desa Indari dalam Anggaran 2 tahun terakhir.

Tabel.1.2. Jumlah Anggaran Dana Desa Indari

NO	Tahun	Anggaran Dana Desa
1	2021	625.000.000
2	2022	747.000.000

Sumber: APBDesa Desa Indari

Pada tahun 2021 anggaran Dana Desa Indari berjumlah Rp 625.000.000 juta dengan kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran Rp 625.000.000. non formal milik Desa, Penyelenggaraan 2021 Rp 625.000.000 sarana dan prasarana Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu Pembangunan. Kegiatan dengan Jumlah anggaran sebesar Rp Rp 625.000.000 penggunaan Dana Desa lebih banyak digunakan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2021 anggaran Dana Desa berjumlah Rp 625.000.000 juta. dengan kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Anggaran intensif Pelayanan Desa, Pada tahun 2021 Anggaran Dana Desa berjumlah Rp 625.000.000 juta. dengan kegiatan pertama adalah di Bidang Pembangunan Pemerintah desa yaitu Kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Anggaran Rp 625.000.000 juta. yang mencakup Sub Pekerjaan umum dan penataan ruang berupa Pembangunan selokan sedangkan Sub Bidang pembangunan,. Kegiatan Kedua di bidang pembangunan jembatan spit Desa indari ditahun 2022, lebih banyak difokuskan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan jembatan spit Desa Indari. Berdasarkan data tersebut terlihat dengan jelas bahwa pemasukan Dana Desa Indari dari tahun 2021-2022 terus mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan



semakin menurunnya dana yang diterima Desa setiap Tahunnya. Sedangkan ditahun 2022 anggaran Dana Desa berjumlah Rp 747.000.000 juta. untuk membangun pelabuhan spit ada pun rincian anggaran. Sesuai dengan pernyataan dari Anggota BPD menyatakan bahwa.

Tabel.I
Program Pembangunan Pembangunan Desa Indari
Tahun 2023

No	Jenis Pembangunan	Pembangunan Per Unit	Dimensi	Anggaran Rp	Jumlah Rp
1	Jembatan speed	1 Unit Jembatan Speed	3x19m	225.000.000	225.000.00
2	Pagar Beton	1 Unit Pagar Beton	1.40x200x25	245.000.000	245.000.000
3	MCK	1 Unit MCK	4x3	56.000.000	56.000.000
4	Air Bersih	Pemasangan Air Bersih	700m 145 staf 111 rumah	221.000.000	221.000.000
Jumlah					Rp 747.000.000

Sumber: Anggar Dana Desa 2022

Tabel. diatas, menggambarkan secara terinci bahwa jumlah penganggaran berdasarkan kebutuhan dalam kebijakan peningkatan mutu pemerintah desa indari dengan total sebesar. Rp, 747.000.000 juta.

Dari total anggaran pendapatan dan belanja pemerintah desa indari kecamatan bacan barat kabupaten Halmahera selatan tahun 2022 sebesar Rp, 747.000.000 juta. yang dirinci berdasarkan kebutuhan pembangunan.

Ada beberapa pembangunan di desa indari,yakni: pembuatan pagar baton dengan jumlah anggaran Rp245.000.000 juta. pemasangan air bersih di desa indari dengan jumlah anggaran Rp221.000.000 juta pembangunan MCK UMUM dengan jumlah anggaran Rp56.000.000 juta.itulah infrastruktur desa indari yang telah diselesaikan oleh pemerintah desa indari, kini tinggal pembangunan jembatan spit, anggaran pembangunan jembatan spit belum juga



diselesaikan, karena masi hambatan yang di dapatkan oleh, tapi sudah diketahui oleh BPD bahwa anggaran sebesar Rp225.000.000 juta. Yang akan di keluarkan oleh pemerintah desa indari.

Pengawasan Penganggaran.

Pengawasan anggaran adalah kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang di alokasikan untuk membiayai pelaksanaan dari rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar anggaran tersebut di gunakan sebagai mana mestinya dan dapat di laksanakan secara efektif dan efesien

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga pemerintahan di Desa yang mempunyai fungsi dalam pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan dasar hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dana Desa yang bersumber dari APBN mempunyai jumlah yang tidak sedikit, oleh sebab itu diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa Maka dana Desa yang digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“...sebelum kami melakukan pengawasan terhadap satu pembangunan infrastruktur, pertama kami melakukan rapat internal khusus anggota BPD. Rapat yang dibicarakan tentang pembagian tugas pengawasan. Dengan satu jadwal yang di sepakati secara bersama pada rapat tersebut.(wawancara, ketua BPD Desa Indari, selasa 2 mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Setelah BPD melaksanakan rapat internal, kemudian dalam pelaksanaan pengawasan disesuaikan pada jadwal yang telah di sepakati.untuk dalam hal pengawasan tersebut.kini dalam hal pengawasan anggaran, BPD semuanya langsung meliat dan mengambil data falit sebesar anggaran yang sudah ada untuk melaksanakan dalam melakukan pembangunan jembatan.

Pengawasan langsung Oleh BPD.



BPD selama ini telah menjalankan beberapa fungsinya terutama dalam membahasa anggaran pendapatan dan belanja Desa indari. Pembahasan anggaran ini biasanya dilakukan saat pihak Desa Indari menerima anggaran desa dari pemerintah atau sumber lainnya. Tidak hanya itu pembahasan anggaran pembangunan Desa Indari juga dilakukan dengan pihak BPD saat hendak mengeluarkan anggaran tersebut terhadap pembangunan Desa Indari.

Keterlibatan BPD dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Desa juga dikemukakan oleh salah satu anggota BPD Desa Indari,yakni sebagai berikut:

1. Pembangunan Jembatan Spit
2. Pembuatan pagar beton
3. Pembuatan MCK
4. Pemasangan air bersih

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa merupakan baik terpenting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maupun peningkatan pelayanan k kepentingan lainnya.

“...Bahawa kami melakukan pengawasan secara langsung, makasud secara langsung adalah anggaran yang dikeluarkan untuk proses pembangunan aitu dilihat berapa jumlah banyaknya juga pembagian anggran untuk balanjar barang yang nanti dipakai dalam proses pembangunan.(wawancara,wakil ketua BPD Desa Indari,selasa, 2 mei 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Indari dalam hal pengawasan penganggaran adalah bersifat trasparansi akuntabel dan juga kepastian hukum. Pengawasan ini dilakukan dalam bentuk pengaawasan secara langsung, Oleh badan permusyawaratan desa ke pemerintah desa .

Pengawasan BPD dalam pekerjaan.

Adanya pembangunan infrastruktur yang memberdayakan masyarakat akan berdampak pada dua pihak yaitu pihak masyarakat dan hasil pembangunan pada pihak masyrakat pekerja yang dilibatkan masyarakat desa indari yang merupakan pekerjaan pilihan yang memiliki keahlian, kemampuan dan mengerti pada bidang pembangunan infrastruktur dan memiliki fisik serta stamina yang kuat dalam pekerjaan lapangan.



“...Kami dari BPD tidak ingin dan tidak mengambil pekerja dan buruh dari luar desa kami, kami ingin pekerja dan buruh pembangunan jembatan itu di rasakan masyarakat desa, agar mereka juga ikut serta dalam pembangunan jembatan, dan beberapa infrastruktur lainnya, tapi kami tidak memperkerjakan mereka dengan sia-sia kami akan membayar mereka agar mereka juga merasakan kenikmatan dua kali, kenapa kami mengatakan kenikmatan dua kali, karena harus di gaji dan mereka pun senang karena jembatan yang mereka tunggu selama ini telah terlaksana. (wawancara, anggota BPD Desa Indari, Selasa, 2 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kini BPD tidak ingin memperkerjakan pekerja dan buruh diluar desa indari, maksudnya BPD tidak menerima material dan pekerja dari luar desa indari itu agar masyarakat juga menikmati anggaran dari desa, karena BPD tidak mau anggaran yang dikeluarkan dari pemerintah desa itu membayar pekerja dan buruh luar desa, sebab BPD ingin masyarakat desa indari merasakan anggaran pembangunan tersebut. Apabila sudah terlaksanakan maka masyarakat desa akan merasa senang, sebab apa yang mereka tunggu-tunggu selama ini telah tercapai.

Pengawasan Pembangunan Pagar Beton.

Dengan dibangunnya pagar beton ini bias terlihat lebih rapi dan terhindar dari hewan liar yang merusak tanaman di rumah-rumah warga. Karena pembangunan pagar beton sangatlah penting bagi masyarakat Desa Indari. Pembangunan pagar beton melalui Dana Desa (DD) 2022 senilai Rp, 245.000.000. Pembangunan pagar beton sepanjang 200 meter, tinggi pagar 1.4 cm, dan ketebalannya 25 dengan anggaran sebesar Rp, 245.000.000 juta. di lihat dari harga pasaran yang ada di labuha dengan panjang yang sama hanya dengan menggunakan dana sebesar Rp, 245.000.000 juta terlihat dari optimalnya dana yang di gunakan dari aparatur desa dalam pembuatan pagar beton dengan harga pasaran yang ada. Pembangunan pagar beton yang dilakukan di bangun didesa indari.

“...Kami akan terus mengawasi pembangunan pagar beton, dengan adanya pagar beton maka terlihat bagus oleh masyarakat Desa Indari dan terlihat indah. (wawancara, anggota BPD Desa Indari, Selasa, 2 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Indari dalam hal pengawasan pembangunan pagar beton.

“...Kami dari BPD akan terus mengawasi pembangunan pagar beton dan bersama pemerintah desa indari, dari pengawasan ini kami BPD akan melaksanakan pembangunan tersebut. (wawancara, Anggota BPD Desa Indari, Selasa, 2 Mei 2023)



Berdasarkan wawancara tersebut pengawasan BPD dalam pembangunan pagar beton akan terlaksanakan dan bersama pemerintah desa.

Pengawasan Pembangunan MCK

Sebanyak satu (1) yunit proyek pembnagunan MCK di Desa Indari Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmaherah Selatan. Senilai lebih dari Rp56.000.000 juta, yang dikerjakan oleh organisasi masyarakat Desa Indari. Proyek yang bersumber dari Dana Desa (DD) 2022 ini dikerjakan secara kebersamaan oleh Desa Indari yang di awasi langsung oleh BPD dan Pemerintah Desa. Pengawasan oleh BPD mulai dari proses pengusulan, perencanaan, penyelenggaraan pekerjaan dan melakukan pengawasan pekerjaan agar pembangunan berjalan dengan lancar.

Pembangunann MCK sebanyak satu (1) yunit dengan anggaran sebesar Rp.56.000.000 juta.dilihat dari harga genteng,wc,kayu,semen,pasir, dan batu pasaran yang ada di Indari dengan harga sebesar Rp.23.000.000 juta.kini sudah terselesaikan dan berjalan dengan lancar.

“...Kami dari pemerintah desa akan terus membantu BPD sehingga pembangunan tersebut berjalan dengan lancar apa bila anggarannya masi kurang kami akan sidiakan (wawancara, Kaur Pembangunan Desa Indari, selasa, 2 mei 2023)

Berdasarkan wawancara di atas kaur Pembnagunan selalu membantu setiap pelaksanaan pembangunan yang diawasi oleh BPD sebagai pengawasan dalam pelaksanaan infrastruktur didesa Indari Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan.

Pengawasan Air Bersih

Sebagai dukungan terhadap kewenangan Desa khususnya pemenuhan terhadap pengelolaan air minum bersekala desa. Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar air minum bagi warga Desa Indari dengan adanya air minum maka masyarakat Desa Indari tidak lagi susah payah mengambil air yang sangat jauh. Pentingnya kersedian air bersih untuk kehidupan yang layak, untuk itu penyediaan air bersih yang bertanggung jawab atas pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya air bersih atau air minum ini maka masyarakat Desa Indari tidak lagi ke kali (sungai).pemasangan air bersih di setiap-tiap rumah dengan jarak dari tempat sumber nya berjarak 700 meter anggaran



pemasangannya sebesar Rp 221.000.000 juta. Dilihat dari pasaran harga pipa hitam, pipa putih, dan lem. Dengan jumlah pipa 145 staf.

“...Kami dari BPD akan selalu mengawasi pembangunan atau pemasangan air bersih yang berada di Desa Indari samapai selesai sehingga masyarakat Desa Indari merasakan air bersih tersebut. (Anggota BPD Desa indari, 2 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa BPD akan selalu mengawasi pembangunan air bersih dan pemasangan sampai selesai dengan anggaran yang sudah ditetapkan

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Badan Permusyawaratan (BPD) Dalam Pelaksanaan Iinfrastruktur Di Desa Indari Kec. Bacan Barat. sebagai berikut.:

1. Pengawasan BPD dalam pelaksanaan infrastruktur desa Indari dilakukan secara langsung, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih mendalam terkait perkembangan program, baik dari aspek waktu, realisasi anggaran serta target yang harus di penuhi sesuai dengan rencana yang telah di sepakati dalam perencanaan pembanunan.
2. Pengawasan BPD dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 meliputi program pembangunan pagar beton, pembangunan MCK dan pembangunan air bersih, Program tersebut menjadi prioritas karena selain menjadi kebutuhan namun pada saat yang sama dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat desa indari saat ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

1. Pengawasan BPD kedepan perlu ditingkatkan agar setiap program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.



2. Program pembangunan ke depan agar lebih memprioritaskan sejumlah masalah yang hingga kini belum terlaksana seperti pembangunan jembatan speed boat.

DAFTAR PUSTAKA

- Buyung, Bulizuar, 1986. Sistem Administrasi Negara Indonesia, Penerbit. Jakarta: Karunika.
- Ginandjar Kartasasmita, 2006. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Haw, Widja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh Jakarta: Grafindo Persada
- Moleong, L, J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya.
- Rivai, Veithzal. 2004. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- R. Terry. 2006. George. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Arkasa.
- Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siagian, P. Sondang, 2008. Pengantar Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sujamto, 1989. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujamto, 1983. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro.M.P dan Smith.S.C, (2011), Pembangunan Ekonomi. Edisi Sebelas. Jakarta: Erlangga.
- Universitas Jember, 2016. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember. Jember: Jember University Press.
- Usman, H. Dan Akbar, P.S 2009. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara.

INTERNET

- <http://repository.uin-suska.ac.id/4201/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 28 Maret 2018, pukul 22.21 WIB)
- http://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pembangunan_28.html (diakses pada tanggal 28 Maret 2018, pukul 22.40 WIB)
- [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/04/Jurnal%20Wati%20\(04-26-16-06-56-55\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/04/Jurnal%20Wati%20(04-26-16-06-56-55).pdf) (diakses pada tanggal 29 Maret 2018, pukul 13.15 WIB)